

RINGKASAN

Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung-jawab. Tanggung jawab dan sekaligus tujuan Otonomi Daerah ialah (a) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, (b) mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, (c) memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, dan antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Otonomi Daerah itu didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang tujuan pokoknya adalah (a) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. (b) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel dan pasti.

Dengan mendasarkan pada pelaksanaan Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota, apakah mempengaruhi kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Untuk itu guna menjawab persoalan tersebut maka perlu dilakukan studi mengenai “Pengaruh Struktur Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, memberikan dorongan kepada peneliti untuk mengkaji lebih jauh dengan rumusan masalah yang dibuat beberapa pertanyaan, apakah struktur pendapatan berpengaruh terhadap struktur belanja?, struktur pendapatan berpengaruh terhadap kemandirian wilayah?, struktur belanja berpengaruh terhadap kemandirian wilayah?, struktur belanja berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda?, kemandirian wilayah berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda?, kemudian apakah ada pengaruh merubah standardisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan.

Tujuan dari penelitian studi ini adalah mengukur dan menganalisis pengaruh struktur pendapatan terhadap struktur belanja, mengukur dan menganalisis pengaruh struktur pendapatan terhadap kemandirian wilayah, mengukur dan menganalisis pengaruh struktur belanja terhadap kemandirian wilayah, mengukur dan menganalisis pengaruh struktur belanja terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi, mengukur dan menganalisis pengaruh kemandirian wilayah terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda.

mengukur dan menganalisis standardisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standardisasi yang ditetapkan.

Pengertian wilayah (*region*) dalam ilmu regional bukanlah sekedar wilayah yang didemarkasi secara arbitrary, tetapi wilayah yang sangat berarti karena di dalamnya terdapat beberapa masalah sosial ekonomi yang terkait dengan region tersebut, karena di dalamnya terkandung berbagai masalah ekonomi sosial yang berkaitan dengan kehidupan perkotaan, seperti masalah perumahan, masalah sanitasi, jasa publik, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dipahami / ditegaskan perbedaan pokok antara ilmu regional dengan ilmu ekonomi konvensional, terutama mengenai perlakuannya terhadap dimensi spasial. Kemudian dengan Pergeseran dari era sentralisasi ke desentralisasi itu menandakan tengah terjadi perubahan paradigma baru seiring masa transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayahnya adalah meningkatkan sumber-sumber potensi ekonomi untuk dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan usaha oleh sektor swasta, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah khususnya dan tentunya hal tersebut dapat tercapai melalui penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif dan mengarah kepada kegiatan usaha yang *profitable*.

Membahas tentang Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dengan konsep desentralisasi, yang mengandung makna bahwa wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya disebut Otonomi Daerah. Pemerintah Kota seharusnya berusaha meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya, karena tuntutan penduduk akan pelayanan umum dan sosial semakin meningkat, hal ini untuk menciptakan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lazim disebut Keuangan Daerah.

Berdasarkan kerangka proses berpikir dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan dalam studi ini adalah Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Struktur Belanja, Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi, Kemandirian Wilayah berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda.

Metode penelitian studi ini berbasis pada penelitian *eksplanatori*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan struktur pendapatan dan belanja pemerintah kota terhadap kemandirian wilayah dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Penelitian ini diambil data untuk seluruh kecamatan di Kota Samarinda. Dengan demikian penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data penelitian berbentuk

data *time series* dari tahun 2001 sampai dengan 2003, sehingga merupakan *pooled data*, yaitu data gabungan antara data *time series* (2001 sampai dengan 2003; selama 3 tahun) dengan data *cross sectional* (6 Kecamatan) sedangkan teknik pengambilan populasi data meliputi kegiatan, melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, membuat tabulasi data yang akurat, sesuai dengan kebutuhan analisis, melakukan analisis finansial yang meliputi ratio PAD/APBD, APBD/PDRB dan PAD/PDRB, melakukan analisis data.

Dalam penelitian ini digunakan variabel eksogen atau otonomi dan variabel endogen dan intervening yang terdiri dari, Variabel struktur pendapatan, diukur berdasarkan indikator Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima dari Provinsi dan Pusat. PAD diukur berdasarkan item yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dana perimbangan yang diterima dari Provinsi diukur berdasarkan item yang meliputi bagi hasil pajak dan subsidi / bantuan, sedangkan dana perimbangan pusat bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK serta pinjaman daerah; Variabel struktur belanja diukur berdasarkan indikator belanja rutin dan belanja pembangunan yang terdiri dari SOC dan DPI. Belanja rutin diukur berdasarkan item belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja lainnya. Belanja pembangunan yang terdiri dari *Social Overhead Capital* (SOC) dan *Directly Productivity Investment* (DPI) diukur berdasarkan item-item berupa 20 sektor pembangunan ; Variabel kemandirian wilayah diukur berdasarkan indikator rasio PAD terhadap APBD, APBD terhadap PDRB dan PAD terhadap PDRB serta Variabel perkembangan kegiatan sosial ekonomi diukur berdasarkan indikator berupa PDRB, pendapatan per kapita, tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengetahui Kemandirian dan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, maka dilakukanlah analisis Pengujian Hipotesis Penelitian dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*). Kemudian Analisis Posisi Tingkat Kemandirian Wilayah diukur menggunakan Analisis Deskriptif dengan membandingkan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Zadjuli (2002, 2004 dan 2005).

Hipotesis Kesatu, Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Struktur Belanja. Dari hipotesis tersebut terdapat pengaruh signifikan, dengan koefisien path = 0,763 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Struktur Pendapatan semakin tinggi pula Struktur Belanja. Hipotesis Kedua, Struktur Pendapatan berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Dari hipotesis tersebut ternyata Struktur Pendapatan berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah, dengan koefisien path = -0,080 dan $p = 0,830$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hipotesis Ketiga, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Pengaruh Struktur Belanja terhadap Kemandirian wilayah adalah non signifikan, dengan koefisien path = -0,451 dan $p = 0,239$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %). Hipotesis Keempat, Struktur Belanja berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, dengan koefisien path = -0,047 dan $p = 0,792$ pada derajat $\alpha = 0,05$

(5 %). Hipotesis Kelima, Kemandirian Wilayah berpengaruh terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Kemandirian Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda, dengan koefisien path = 0,797 dan $p = 0,000$ pada derajat $\alpha = 0,05$ (5 %).

Secara deskriptif dianalisis Kemandirian Wilayah, yakni hasilnya PAD/APBD rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 6,98 % masih dalam posisi otonomi konsolidasi, karena PAD/APBD belum mencapai 15 %. PAD/PDRB harga konstan rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun 1,22 %. Melihat angka tersebut dapat dikategorikan Samarinda masuk dalam posisi otonomi rendah. Akan tetapi jika dilihat dari PAD/PDRB harga berlaku pada kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 0,57 %, maka otonomi dalam menuju kemandirian wilayah belum mencapai posisi otonomi konsolidasi karena masih < 5 %. APBD/PDRB harga konstan dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata sebesar 17,47 %, dapat dikatakan pada posisi otonomi tinggi, karena telah mencapai > 15 %. Namun dengan memperhatikan APBD/PDRB harga berlaku dalam kurun waktu 3 tahun rata-rata 8,17 %, termasuk dalam posisi otonomi rendah, karena masih belum mencapai 10 % - 15 %. Dengan demikian rumusan masalah keenam yang berbunyi apakah Otonomi Daerah merubah standarisasi posisi otonomi dari konsolidasi ke otonomi rendah, sedang atau tinggi, dengan standarisasi yang ditetapkan dapat dinyatakan PAD/APBD mencapai posisi konsolidasi, PAD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan PAD/PDRB harga berlaku posisi konsolidasi serta APBD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan APBD/PDRB harga berlaku posisi Otonomi Rendah.

Dalam penelitian studi ini terdapat keterbatasan, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga tingkat validitas data sangat ditentukan oleh sumber data berupa dokumentasi. Peneliti hanya bisa melakukan triangulasi secara terbatas dengan melakukan *cross check* berupa observasi pada kecamatan se Kota Samarinda juga yang sulit diukur terdapat interkoneksi antar kota, kabupaten dan provinsi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap Kota Samarinda. Sedangkan aktivitas ekonomi di Kota Samarinda yang diukur adalah keuangan Pemerintah Kota dan pengaruhnya terhadap kemandirian wilayah dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Realitanya faktor-faktor konsumsi, investasi dan ekspor-impor yang dapat membentuk Produk Domestik Regional Bruto tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Hasil studi ini dapat disimpulkan, Struktur Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Belanja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk Belanja Pemerintah Kota Samarinda. Struktur Pendapatan berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Hal ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis kesatu, yang mengindikasikan adanya keterbatasan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kepada daerah, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh Kota Samarinda. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Kemandirian Wilayah Kota Samarinda. Satu

diantaranya disebabkan oleh banyaknya dana yang diprogramkan dan dilaksanakan untuk kepentingan belanja *Social Overhead Capital* (SOC) di mana dana tersebut dalam jangka pendek relatif tidak menghasilkan pendapatan, walaupun dalam jangka panjang ada program yang dapat menghasilkan pendapatan. Struktur Belanja berpengaruh non signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Dapat ditegaskan bahwa Pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebenarnya dapat menerapkan prinsip pembangunan yang mendasar (*Based Development*). Yakni, bagaimana pembangunan serta tujuan utama pembangunan itu tumbuh dari masyarakat dan dilakukan demi masyarakat sendiri. Kemandirian Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Perkembangan Kegiatan Sosial Masyarakat Ekonomi Kota Samarinda. Berarti semakin tinggi tingkat Kemandirian Wilayah berdampak pada perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga komponen *stage holder* dan dikenal dengan segitiga pelaku pembangunan yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. Untuk standardisasi otonomi ternyata PAD/APBD mencapai posisi konsolidasi, PAD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan PAD/PDRB harga berlaku posisi konsolidasi serta APBD/PDRB harga konstan Otonomi Rendah dan APBD/PDRB harga berlaku posisi Otonomi Rendah.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan daerah yang terkait dengan penggalan dana Pendapatan Asli Daerah belum dapat dilakukan secara optimal, karena adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan ketergantungan terhadap dana perimbangan cukup tinggi. Arah penggunaan dana lebih banyak pada *Social Overhead Capital* (SOC) dibandingkan dengan *Directly Productivity Investment* (DPI). Pembangunan yang dilakukan di Samarinda relatif belum mengacu pada *Based Development*. Dalam pelaksanaan pembangunan, tiga *stage holder* atau segitiga pelaku pembangunan tidak dapat dipisahkan antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.

Akhirnya dapat disarankan Cadangan Anggaran Pembangunan yang disimpan pada Bank dapat hasil jasa giro dan deposito mobile dan dapat digunakan sebagai dana cadangan untuk mengatasi yang bersifat darurat di daerah, baik pada tahun berjalan maupun pada awal tahun anggaran.

Kewenangan Pemerintah Daerah di dalam menggali potensi Pendapatan Daerah dan sektor bisnis perlu mendapat keterlibatan yang cukup dalam mengembangkan kegiatannya guna mendukung pembangunan yang berefek penggandaan (*multiplier effect*) dengan mengacu pada pembangunan yang berkekuatan masyarakat. Kemudian Struktur Belanja lebih banyak diarahkan pada pengeluaran yang bersifat *Directly Productivity Investment* (DPI). Pembangunan *Social Overhead Capital* (SOC), diarahkan pada istilah lebih baik memberi pancing dibandingkan memberi ikan, terkecuali pada hal-hal yang secara manusiawi harus mendapat perhatian pemerintah. Selain itu perlu melibatkan masyarakat dan pihak swasta yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Interkoneksi pembangunan baik konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor antar kota, kabupaten, provinsi dan Pemerintah Pusat, memberi isyarat manajemen pembangunan dan keuangan di Kota Samarinda, harus memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya dan kekuatan yang ada di daerah masing-masing.

SUMMARY

Effect of Income Structure and Government Expenditure Municipal on The Regional Independence and Development of Socio-Economic Activities Samarinda City

H. Abd. Rachim AF.

On the basis of Act No. 22/1999, Regional Government is defined as an Autonomous Regional Authority to manage and organize the local people's interests under their initiatives themselves based on community aspiration in line with the generally accepted laws in Indonesia. Authority to manage their own affairs has broad meaning and accountability. The responsibility and objective of the Regional Autonomy is (a) to improve service provided to the public and increase the community well-being, (b) to develop democratic life, social justice and distribution among people, and (c) to establish harmonious relationship between the central government and regional government, and among regional governments for the purpose of maintaining the integration of unitary state of Republic of Indonesia. The administration of the Regional Autonomy is supported by Act No. 25/1999 regarding the balanced budget between the central government and regional government whose its main goal is to (a) empower and enhance capability of local economy and (b) create the fair, proportional, rational, transparent, participatory, accountable and definitive local budgeting system.

Given the sectoral development implementation within the regional autonomy era, whether the local income and expenditure structures influence the regional independence and development of socio-economic activities in Samarinda City. Therefore, to answer this essential question, the study on "Effect of Sectoral Development Implementation on the Regional Independence and Development of Socio-economic Activities within the Regional Autonomy Era of Samarinda City" is conducted.

In concert with the brief description above, the researcher is encouraged to further study problems stated in the form of questions, including whether the

income structure influences the expenditure structure?, whether the income structure has an effect on the regional independence?, whether the expenditure structure has a correlation with development of socio-economic activities?, whether the regional independence has a correlation with development of socio-economic activities?, and whether the regional autonomy implementation has shifted the standardization of the autonomy position from consolidation to *steady growth*, low autonomy, moderate or high autonomy, under the predetermined standardization.

The objective of this research was to measure and analyze the effect of income structure on expenditure structure, the effect of the income structure on the regional independence, the effect of the expenditure structure on the regional independence, the influence of the expenditure structure on the development of socio-economic activities, the impact of the regional independence on the development of socio-economic activities, as well as measure and analyze the impact of Regional Autonomy era in changing the standardization of autonomy position from consolidation to *steady growth*, low autonomy, moderate autonomy or high autonomy, based on the predetermined standardization.

Term “region” in a regional science is not merely region which is demarcated in arbitrary manner, but this region has a very significant meaning since in which there are some socio-economic problems closely related to the region. Thus, region is continually faced with many socio-economic problems relative to urban life, including housing problem, sanitary, public service and many other problems. Therefore, a distinction can be made between the regional science and conventional economic science, particularly in the case of treatment of spatial dimension. Then, a shift from centralization to decentralization symbolizes a change in new paradigm in agreement with the transitory period from authoritarianism toward democracy within the context of living in country, nation and community.

One important thing which the regional government does in accomplishing the regional independence is increasing potential economic resources that can be developed further by the private sector. It is highly

expected that such a activity can bring about an increase in local people's income in general and regional government's income in particular. Of course, this may be achieved through creation of conducive climate for investment leading to a profitable business.

Discussion of the regional autonomy can be separated from decentralization concept, implying that authority in managing and organizing the wheels of government is not only done by the central government but also by the lower government level (local government) beyond the central government. The lower government's authority of managing and organizing the government's affairs in its own region is called the regional government. The municipal government should make some efforts in building up the local income annually. This may be the case since the public demand for better social service also increases. This is designed to create the regional independence in organizing its own affairs, that is put into the form of the Regional Budget that is commonly called as Regional Finance.

In associated with the frame of thought and conceptual framework, several hypotheses raised in this research are the income structure has an effect on the expenditure structure; the income structure exerts an impact on the regional independence; the expenditure structure is correlated with the regional independence; the expenditure structure has a correlation with development in the socio-economic activities; the regional independence influences the development of the socio-economic activities in Samarinda City; and the regional autonomy implementation has an effect in changing the standardization of autonomy position from consolidation on the basis of the predetermined standardization.

The research method in this study was grounded on the explanatory research, namely this research was deliberately designed to examine and explain the effect of the sectoral development implementation on the regional independence and development of socio-economic activities in Samarinda City. The data were collected from all sub districts existing in Samarinda City. Thus, the research was conducted on the basis of census where its data were in the

coefficient = 0.763 (0.000). This indicated that the larger income structure would produce the larger expenditure structure. Thus, the first hypothesis saying that “The income structure influences the expenditure structure in Samarinda City” was accepted. In the second hypothesis, there was very strong positive influence (path coefficient = 0.763), implying that most incomes were used for some expenditures. In guideline for development of APBD, there was a component of so-called development budget reserve (CAP). This served as a reserved funds for emergency condition that might occur in regional government both within the current fiscal year and at the beginning of fiscal year when the balanced budget from the central government came late. This has not been well accommodated by the Samarinda Municipal Government in developing and implementing the APBD. The income structure didn't generate a significant effect on the regional independence (path coefficient = 0.080 and $p = 0.830$). Thus, the third hypothesis stating that “The income structure has a significant impact on the regional independence of Samarinda City” was rejected. Furthermore, the effect of the expenditure structure on the regional independence was not significant ($p = 0.139$). Similarly, the fourth hypothesis suggesting that “The expenditure structure significantly influences the regional independence” was rejected. Given significance level of 0.139, the path coefficient would be equal to -0.451 . This indicated that when the expenditure structure was larger, then the regional independence would decrease in larger extent. The expenditure structure produced an insignificant influence on the development of socio-economic activities ($p = 0.792$). Thus, the fifth hypothesis saying that “The expenditure structure induces significant impact on the development of socio-economic activities” was rejected. The regional independence possessed a significant and negative correlation with the development of socio-economic activities (path coefficient = -0.797 and $p = 0.000$). Thus, the sixth hypothesis arguing that “The regional independence has a significant correlation with the development of socio-economic activities in Samarinda City” was accepted. The regional autonomy implementation having a significant effect in shifting standardization of the autonomy position from

consolidation on the basis of predetermined standardization was apparently rejected.

Of course, this research has some limitation, one of which is that the research uses secondary data. Consequently, data validity level is extremely determined by source of data in the form of documentation. The researcher can merely perform a limited triangulation by cross check, that is, by observing all sub districts existing in Samarinda City in which interconnectivity among city, district and province is difficult to measure regarding a wide-range of social and economic activities which may influence Samarinda City.

In order that the regional independence can be accomplished adequately, then there should be a proper policy needed to develop General Guideline and Policy (AKU) and Regional Strategic Plan (Renstrada) as well as there should be some programs necessary to improve the regional independence so that standardization of regional independence degree can be improved accordingly. In addition, the expenditure structure must be more oriented to some expenditures having characteristics of Directly Productivity Investment (DPI) where the latter factor directly produces *multiplier effect* on development of socio-economic activities which in turn can enhance the regional independence. The expenditure structure also necessarily pays an attention to interconnectivity among city, district and province in East Kalimantan and Central Government so that the financial management in Samarinda City can not be parted from this interconnectivity.

ABSTRACT

Effect of the Municipal Government's Income and Expenditure Structures on Regional Dependence and Development of Socio-Economic Activities in Samarinda City

Objective of the recent study was to analyze and examine the effect of income structure on expenditure structure, the effect of the income structure on the regional independence, the effect of the expenditure structure on the regional independence, the influence of the expenditure structure on the development of socio-economic activities, the impact of the regional independence on the development of socio-economic activities and describe a shift in the Regional Autonomy based on standardization of autonomy position from consolidation to low, moderate and high autonomy under the predetermined standardization.

The research method in this study was grounded on the explanatory research, namely this research was deliberately designed to examine and explain the effect of the income and expenditure structures implementation of the municipal government on the regional independence and development of socio-economic activities in Samarinda City. The data were collected from all subdistricts existing in Samarinda City. Thus, the research was conducted on the basis of census where its data were in the form of *time series* data starting from 2001 up to 2003. These data constituted *pooled data*, namely a combination of both *time series* data (for three years, starting from 2001 up to 2003) and *cross sectional* data (6 subdistricts). To know the independence and socio-economic activities in subdistrict areas in Samarinda City, then some hypotheses were tested making the use of path analysis. Moreover, the descriptive analysis was also used to analyze and examine the position of Regional Independence level in accordance with the predetermined standardization.

On the basis of the results using the path analysis, it was suggested that the income structure was significantly correlated with the expenditure structure; the income structure was not significantly correlated with the regional independence. Furthermore, the expenditure structure was not significantly correlated with the regional independence. The expenditure structure didn't produce a significant effect on the development of socio-economic activities in Samarinda City. The regional independence indicated a significant correlation with the development of socio-economic activities. The regional autonomy implementation has brought about a shift in standardization of the autonomy position from consolidation. Under the predetermined standardization, then it could be said that PAD/APBD has achieved a consolidated position, PAD/PDRB of the constant value achieved the Low Autonomy, PAD/PDRB of the current value achieved the consolidated position, and APBD/PDRB of the constant value achieved the Low Autonomy and APBD/PDRB of the current value achieved the Low Autonomy position.

Keywords : *income structure, expenditure structure, regional independence, development of socio-economic activities and regional autonomy position.*